

Cakrawala Pendidikan Islam :Isu-Isu Kurikulum, Minimnya Sdm, Keterbatasan Akses, Aspek Management Dan Daya Saing Yang Rendah

Firdaus¹, Hendri², Rusydi AM³, Riki Saputra⁴, Sri Wahyuni⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sumaera Barat

Corresponding Author: firdausgani08@gmail.com, hendriechnia@gmail.com, rusydi@umsb.ac.id,
rakisaputra.rs87@gmail.com, sriwahyuni20201988@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Problematika utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, meliputi beban kurikulum yang masih bersifat konformis dan kurang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, serta minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pendidik yang belum sepenuhnya memenuhi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan social. Selain itu, keterbatasan akses—baik secara geografis di daerah terpencil maupun keterbatasan infrastruktur teknologi informasi—menyebabkan kesenjangan kesempatan belajar bagi santri dan peserta didik. Dari sisi manajemen kelembagaan, regulasi dan tata kelola pendanaan yang belum terintegrasi serta kapasitas manajerial pimpinan lembaga Islam yang terbatas menghambat optimalisasi sarana-prasarana dan inovasi kurikulum. Akibat kumulatif dari faktor-faktor tersebut adalah rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun internasional, ditandai oleh rendahnya kemampuan literasi sains dan teknologi serta produktivitas riset keislaman. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, lalu menawarkan rekomendasi berupa penyusunan kurikulum berbasis kompetensi kontekstual, program peningkatan kapasitas guru (termasuk training manajerial), perluasan akses digital melalui kemitraan publik-swasta, serta mekanisme akreditasi yang mendorong inovasi dan kolaborasi lintas institusi.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kurikulum, Sumber daya manusia.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan pilar utama dalam pembangunan peradaban umat Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam telah menjadi fondasi pembentukan karakter, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Tradisi keilmuan dalam Islam berkembang pesat melalui lembaga-lembaga seperti kuttab, madrasah, dan universitas Islam klasik seperti Al-Azhar dan Al-Qarawiyin. Namun, dalam konteks modern, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional, terutama ketika harus bersaing dalam era globalisasi dan revolusi industri 5.0 (Azra, 2012).

Salah satu permasalahan utama adalah ketertinggalan kurikulum pendidikan Islam dalam menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Kurikulum yang masih bersifat tradisional, tidak kontekstual, dan minim inovasi menyebabkan pendidikan Islam sulit berperan optimal dalam menjawab tantangan kontemporer. Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih

mempertahankan sistem pembelajaran berbasis hafalan dan menekankan aspek-aspek ritualistik, tanpa menyentuh pada kebutuhan kompetensi abad 21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kolaborasi (Sahin, 2018).

Kondisi ini diperburuk oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan kompeten dalam bidang pendidikan Islam. Sebagian besar guru di madrasah dan pesantren belum memiliki kualifikasi akademik yang memadai, serta kurang mendapatkan pelatihan pedagogis yang berkelanjutan. Selain itu, banyak lembaga pendidikan Islam tidak memiliki program peningkatan kapasitas guru secara sistemik dan berkelanjutan (Sulaiman & Noor, 2021). Akibatnya, proses pembelajaran menjadi monoton, kurang inspiratif, dan tidak memberikan nilai tambah bagi peserta didik.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kesenjangan geografis, ekonomi, dan infrastruktur menyebabkan banyak anak-anak Muslim di daerah terpencil tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang layak. Laporan Kementerian Agama (2023) menyebutkan bahwa lebih dari 40% lembaga pendidikan Islam di wilayah 3T tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik, internet, dan perpustakaan.

Ketimpangan ini berimplikasi besar terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan Islam. Ketika akses pendidikan tidak merata, maka ketidaksetaraan sosial akan semakin menguat, dan pendidikan Islam akan gagal menjalankan peran strategisnya dalam membangun keadilan dan pemberdayaan umat. Upaya untuk memperluas akses pendidikan Islam harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain itu, aspek manajemen lembaga pendidikan Islam juga menjadi persoalan serius. Banyak lembaga masih dikelola secara tradisional, tidak berbasis data, dan minim inovasi. Pengambilan keputusan seringkali bersifat top-down, tanpa melibatkan partisipasi guru, siswa, atau wali murid. Lemahnya perencanaan strategis dan evaluasi berkelanjutan menyebabkan stagnasi dalam pengembangan lembaga pendidikan (Mukhibat, 2019). Transformasi manajemen pendidikan Islam menjadi penting agar lembaga tersebut mampu bertahan dan bersaing di tengah dinamika zaman.

Tantangan besar lainnya adalah rendahnya daya saing lembaga pendidikan Islam, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam berbagai pemeringkatan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, institusi pendidikan Islam masih tertinggal jauh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas riset, minimnya inovasi kurikulum, dan lemahnya koneksi internasional. Padahal, dalam sejarah Islam, lembaga pendidikan justru menjadi pusat keunggulan peradaban (Al-Attas, 1993).

Rendahnya daya saing juga berkaitan erat dengan kurangnya sinergi antara pendidikan Islam dan dunia industri serta pasar kerja. Banyak lulusan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan oleh dunia kerja modern, seperti kemampuan komunikasi, penggunaan teknologi, dan manajemen proyek. Akibatnya, angka pengangguran di kalangan alumni pendidikan Islam cenderung tinggi, dan mereka terpinggirkan dari arus utama pembangunan nasional.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam membutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup semua aspek, mulai dari desain kurikulum, rekrutmen dan pelatihan guru, pemerataan akses, manajemen kelembagaan, hingga peningkatan daya saing. Reformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus dilandasi oleh visi keislaman yang kuat, yang menempatkan pendidikan sebagai sarana *ta'dib*, yaitu pembentukan insan yang beradab dan berintegritas (Al-Attas, 1993).

Pendidikan Islam juga perlu bertransformasi secara digital dan inovatif. Di era digital, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam sistem pendidikan Islam menjadi sebuah keniscayaan. Penggunaan platform pembelajaran daring, sumber belajar terbuka, dan kecerdasan buatan dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pendidikan Islam.

Menyikapi tantangan dan kompleksitas yang dihadapi, perlu dilakukan kajian akademik yang mendalam terhadap berbagai isu strategis dalam pendidikan Islam. Makalah ini hadir untuk mengelaborasi secara sistematis permasalahan-permasalahan utama yang menghambat kemajuan pendidikan Islam, serta menawarkan kerangka solusi berbasis pendekatan integratif antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip manajemen modern. Dengan kita mencoba memahami secara komprehensif lima isu utama kurikulum, SDM, akses, manajemen, dan daya saing.

PROBLEMATIKA KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum merupakan elemen fundamental dalam pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, penanaman nilai, serta pengembangan potensi peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum seharusnya tidak hanya bertujuan membentuk insan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral. Namun, realitasnya, kurikulum pendidikan Islam masih menyimpan berbagai persoalan mendasar yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Salah satu problematika utama adalah dikotomi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum yang masih melekat kuat di banyak lembaga pendidikan Islam. Pola pembelajaran memisahkan antara ilmu-ilmu keislaman (ulumuddin) dan ilmu pengetahuan modern (sains, teknologi, sosial) menyebabkan terjadinya fragmentasi pengetahuan yang tidak utuh. Hal ini berdampak pada terbentuknya lulusan yang memiliki pemahaman parsial terhadap realitas kehidupan (Abdullah, 2013). Padahal, dalam sejarah keilmuan Islam klasik, tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi mampu memadukan dimensi keilmuan secara holistik tanpa dikotomi.

Kurikulum pendidikan Islam juga sering tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Banyak lembaga pendidikan Islam masih mempertahankan pendekatan pembelajaran tradisional yang menekankan hafalan, bukan pemahaman dan aplikasi. Metode ceramah satu arah dan minimnya eksplorasi kritis menyebabkan proses pembelajaran menjadi stagnan. Di era Revolusi Industri 5.0 yang menuntut kompetensi berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi teknologi, kurikulum yang tidak adaptif akan semakin tertinggal (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2021).

Selain itu, kurangnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran umum juga menjadi kendala. Banyak sekolah Islam atau madrasah mengajarkan matematika, IPA, atau IPS secara terpisah dari nilai-nilai keislaman, sehingga terjadi kekosongan spiritual dalam pelajaran sains. Padahal, salah satu ciri khas pendidikan Islam adalah integrasi antara iman dan ilmu ('ilm). Konsep integrasi-interkoneksi sebagaimana dipopulerkan Amin Abdullah (2013) menjadi penting untuk menghadirkan kurikulum yang menyatukan antara ilmu, akhlak, dan praktik kehidupan.

Persoalan lain adalah belum adanya standar kurikulum yang seragam dan komprehensif bagi semua jenjang pendidikan Islam. Kurikulum madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu kerap kali berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, sehingga terjadi kesenjangan kualitas antar lembaga. Hal ini juga berdampak pada kualitas output pendidikan Islam yang tidak merata dan sulit dikendalikan oleh satu sistem evaluasi nasional yang objektif (Mastuhu, 1994).

Kurikulum pendidikan Islam juga masih kurang memperhatikan pendekatan berbasis kompetensi. Sebagian besar masih menitikberatkan pada isi (content oriented) ketimbang penguasaan kompetensi peserta didik. Akibatnya, peserta didik hanya menguasai teori, namun tidak terampil menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan filosofi pendidikan Islam yang menekankan amal saleh sebagai manifestasi dari ilmu yang benar.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah minimnya pelibatan stakeholder dalam penyusunan kurikulum. Banyak kurikulum pendidikan Islam disusun secara elitis oleh birokrasi atau tokoh agama tanpa melibatkan guru, peserta didik, wali murid, dan masyarakat luas. Ketidadaan partisipasi ini mengakibatkan kurikulum menjadi tidak kontekstual dan tidak relevan dengan kebutuhan lokal maupun global.

Dari aspek pengembangan kurikulum, keterbatasan riset dan kajian akademik tentang inovasi kurikulum Islam menjadi tantangan tersendiri. Lembaga pendidikan Islam jarang menjadikan kurikulum sebagai obyek penelitian ilmiah yang terus-menerus diperbaharui. Padahal, pengembangan kurikulum yang dinamis memerlukan dukungan riset aksi, eksperimen pedagogik, dan evaluasi berkelanjutan (Zuhdi, 2005).

Tidak kalah penting, kurikulum pendidikan Islam juga perlu diarahkan untuk membentuk karakter *rahmatan lil alamin*—yakni pribadi yang toleran, inklusif, dan cinta damai. Dalam konteks multikultural Indonesia, pendidikan Islam berperan strategis dalam membangun sikap moderat dan mencegah ekstremisme. Oleh karena itu, nilai-nilai moderasi Islam harus secara eksplisit masuk dalam desain kurikulum pendidikan sejak dini (Kementerian Agama, 2022).

Sebagai upaya perbaikan, pengembangan kurikulum pendidikan Islam perlu diarahkan pada pendekatan holistik dan integratif. Ini mencakup penyusunan struktur kurikulum yang menyeimbangkan antara ilmu agama dan umum, penerapan pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual, serta penggunaan teknologi digital untuk menunjang proses belajar. Peran guru sebagai perancang dan pelaksana kurikulum juga harus diperkuat melalui pelatihan yang berkelanjutan dan sistem evaluasi yang berbasis kinerja.

Dengan kurikulum yang adaptif, integratif, dan kontekstual, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, reformasi kurikulum menjadi langkah strategis yang harus diutamakan dalam revitalisasi pendidikan Islam menuju peradaban yang unggul dan berkelanjutan.

MINIMNYA SDM PROFESIONAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam keberhasilan proses pendidikan. Guru, tenaga kependidikan, pengelola lembaga, hingga pengambil kebijakan, semuanya memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Namun, dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang profesional dan kompeten.

Pertama-tama, kualitas guru pendidikan Islam masih menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (2023), dari jutaan guru madrasah di seluruh Indonesia, hanya sebagian yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 ke atas sesuai bidang yang diajarkan. Banyak di antaranya yang berasal dari latar belakang non-pendidikan, serta belum memiliki sertifikasi profesi guru. Hal ini menyebabkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang dimiliki guru belum memenuhi standar yang ideal.

Minimnya pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development) juga menjadi kendala besar. Sebagian besar guru di madrasah dan pesantren tidak secara reguler mengikuti pelatihan pedagogis, inovasi pembelajaran, atau peningkatan kompetensi digital. Akibatnya, metode pembelajaran yang digunakan menjadi stagnan dan kurang relevan dengan kebutuhan zaman. Di era digital seperti saat ini, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi dan pendekatan inovatif dalam mengajar (Sulaiman & Noor, 2021).

Tantangan lain adalah distribusi SDM yang tidak merata. Di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan, kekurangan guru agama dan tenaga kependidikan menjadi permasalahan yang akut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya insentif, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Dampaknya, anak-anak Muslim di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak memperoleh pendidikan Islam yang layak dan bermutu (Kemenag RI, 2023).

Dari sisi manajerial, banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki tenaga manajemen profesional. Kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren sering kali diangkat berdasarkan status sosial atau senioritas, bukan berdasarkan kompetensi manajerial. Akibatnya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Pendidikan Islam membutuhkan manajemen berbasis

mutu (total quality management) yang hanya dapat diwujudkan jika SDM di bidang tata kelola memiliki kapasitas yang baik (Mukhibat, 2019).

Minimnya tenaga ahli dalam bidang kurikulum, evaluasi pendidikan, dan riset juga menjadi persoalan penting. Lembaga pendidikan Islam masih jarang memiliki tim pengembang kurikulum atau evaluator internal yang mampu melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan program berbasis data. Kurangnya budaya riset dan refleksi dalam komunitas pendidikan Islam menyebabkan pembaruan kurikulum dan metode pengajaran sering tertinggal dari dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan (Zuhdi, 2005).

Sebagian penyebab dari minimnya SDM profesional adalah lemahnya sistem rekrutmen dan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan. Banyak lembaga pendidikan Islam merekrut guru tanpa seleksi ketat, bahkan terkadang didasarkan atas pertimbangan kedekatan personal atau keagamaan, bukan atas dasar kompetensi akademik. Selain itu, jalur karier bagi guru dan pengelola lembaga pendidikan Islam sering tidak jelas, tanpa jenjang promosi yang berbasis prestasi dan kinerja.

Tidak hanya itu, rendahnya kesejahteraan guru juga menjadi faktor penghambat profesionalisme. Gaji guru di madrasah swasta atau pesantren sering kali jauh di bawah standar upah minimum regional. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi kerja dan kurangnya dedikasi dalam melaksanakan tugas. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan para pendidiknya (UNESCO, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi penguatan SDM pendidikan Islam secara komprehensif. Pertama, sistem rekrutmen harus berbasis kompetensi dan dilakukan secara transparan. Kedua, pelatihan dan pengembangan guru harus menjadi prioritas utama, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swasta. Ketiga, peningkatan kesejahteraan dan jaminan karier bagi tenaga pendidik dan kependidikan perlu menjadi perhatian serius.

Di sisi lain, pendidikan tinggi Islam (seperti UIN, IAIN, STAIN, dan kampus keagamaan lainnya) perlu didorong untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan keislaman yang kuat, tetapi juga berdaya saing secara profesional. Kurikulum pendidikan tinggi keislaman harus diarahkan pada penguatan pedagogik, teknologi pendidikan, dan kemampuan manajerial. Dengan demikian, tercipta SDM unggul yang mampu menjadi aktor transformasi dalam pendidikan Islam.

Revitalisasi SDM pendidikan Islam adalah agenda strategis untuk meningkatkan mutu dan daya saing lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Tanpa SDM yang kompeten dan profesional, seluruh upaya pembaruan kurikulum, manajemen, maupun perluasan akses pendidikan tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, SDM harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan pendidikan Islam.

KETERBATASAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM

Akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas masih menjadi persoalan struktural dan kultural di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan pedesaan, tertinggal, dan wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Padahal, akses yang merata terhadap pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Namun dalam praktiknya, banyak anak-anak Muslim di Indonesia belum memperoleh kesempatan belajar agama secara memadai, baik dari segi ketersediaan lembaga, sarana-prasarana, tenaga pendidik, hingga dukungan finansial keluarga.

Salah satu bentuk keterbatasan akses adalah tidak meratanya persebaran lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, atau sekolah Islam terpadu. Di wilayah urban, masyarakat cenderung memiliki banyak pilihan lembaga pendidikan Islam dengan fasilitas yang memadai. Namun, di daerah terpencil, lembaga-lembaga ini sangat minim, bahkan sering tidak ada sama sekali. Anak-anak harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa mengakses madrasah, dan tidak jarang hal ini memicu angka putus sekolah atau ketidakhadiran siswa (Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2022).

Selain itu, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang menghadapi keterbatasan fasilitas fisik. Ruang kelas yang tidak layak, minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, kurangnya perpustakaan, laboratorium, dan sarana teknologi informasi menjadi hambatan

nyata dalam pencapaian mutu pendidikan. Keterbatasan ini membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan berdampak langsung terhadap kualitas hasil pembelajaran siswa (Azra, 2021).

Keterbatasan akses juga terkait erat dengan latar belakang sosial ekonomi keluarga. Banyak keluarga miskin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama ketika harus membayar biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan biaya tambahan lainnya di luar sekolah. Di pesantren atau madrasah swasta, meski ada bantuan dari pemerintah, namun tidak semua siswa mendapatkannya. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memilih keluar dari sekolah atau hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang dasar.

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau turut memperparah ketimpangan akses. Di kawasan kepulauan, seperti Maluku dan Nusa Tenggara, masih banyak desa yang belum memiliki lembaga pendidikan Islam sama sekali. Transportasi antar pulau yang mahal dan tidak terjangkau membuat anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan agama di tempat yang layak. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses bukan hanya soal fisik atau ekonomi, tetapi juga geografis dan infrastruktur (UNICEF Indonesia, 2022).

Tidak kalah penting, keterbatasan akses terhadap pendidikan Islam berkualitas juga dapat dilihat dari minimnya pemanfaatan teknologi informasi di banyak lembaga. Di era digital seperti sekarang, seharusnya teknologi dapat menjembatani ketimpangan geografis. Namun sayangnya, banyak madrasah dan pesantren belum memiliki perangkat digital, jaringan internet yang memadai, atau kompetensi guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Hal ini menyebabkan pendidikan daring atau blended learning tidak dapat diterapkan secara optimal (Sari & Supriyadi, 2020).

Disparitas kualitas antar lembaga pendidikan Islam juga menjadi bentuk keterbatasan akses tersendiri. Sekolah Islam elite di kota besar memiliki akses terhadap guru-guru lulusan luar negeri, kurikulum internasional, serta fasilitas canggih. Sebaliknya, madrasah di desa-desa terpencil hanya mengandalkan satu atau dua guru untuk semua mata pelajaran, dan masih berkuat dengan kurikulum yang sangat terbatas. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan Islam yang seharusnya setara bagi semua.

Upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan akses telah dilakukan melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah, pembangunan madrasah baru, serta digitalisasi pendidikan Islam. Namun, implementasinya masih belum merata dan banyak terkendala oleh birokrasi, kurangnya data valid, serta rendahnya kapasitas daerah dalam melaksanakan program-program tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Solusi jangka panjang atas persoalan akses pendidikan Islam tidak hanya cukup dengan pembangunan fisik. Diperlukan penguatan dalam bidang teknologi, pelatihan tenaga pendidik, serta sistem beasiswa dan subsidi bagi siswa miskin. Selain itu, penguatan literasi digital dan program inklusi sosial berbasis komunitas juga dapat membantu menjangkau kelompok-kelompok marginal yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan Islam yang layak.

Dengan mengatasi keterbatasan akses ini secara serius dan terencana, maka misi pendidikan Islam yang rahmatan lil 'alamin akan semakin mungkin diwujudkan. Pendidikan Islam tidak boleh menjadi hak istimewa kelompok tertentu, tetapi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil dan merata, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

LEMAHNYA ASPEK MANAJERIAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam adalah lemahnya aspek manajerial. Manajemen pendidikan yang efektif dan profesional merupakan prasyarat utama untuk menjamin keberlangsungan, mutu, dan daya saing lembaga pendidikan. Namun kenyataannya, banyak lembaga pendidikan Islam masih dikelola secara tradisional, tanpa dukungan sistem manajemen modern yang efisien dan akuntabel. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, rendahnya kepuasan

peserta didik, serta ketertinggalan dalam inovasi dan pengembangan kelembagaan (Mujamil Qomar, 2017).

Permasalahan manajerial ini mencakup berbagai dimensi, seperti perencanaan strategis yang lemah, pengelolaan sumber daya manusia yang tidak berbasis kompetensi, serta lemahnya sistem evaluasi dan monitoring kinerja. Banyak lembaga pendidikan Islam tidak memiliki rencana jangka panjang yang terukur dan terstruktur. Pengelolaan keuangan juga sering kali tidak transparan dan tidak mengikuti prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya menimbulkan masalah kepercayaan dari masyarakat (Hasbullah, 2019).

Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam juga menjadi persoalan serius. Banyak kepala madrasah atau pimpinan pesantren belum memiliki pelatihan formal dalam bidang manajemen pendidikan. Mereka lebih banyak mengandalkan pengalaman personal atau pendekatan kultural keagamaan. Meskipun pendekatan ini memiliki kekuatan moral dan spiritual, namun tanpa kemampuan manajerial yang memadai, institusi pendidikan akan sulit berkembang secara profesional. Padahal dalam era globalisasi dan disrupsi digital, kepemimpinan transformatif dan adaptif menjadi sangat penting.

Selain itu, lemahnya sistem administrasi menjadi penghambat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Banyak madrasah atau pesantren yang belum melakukan digitalisasi data administrasi, sehingga pencatatan keuangan, data siswa, kegiatan belajar mengajar, dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dan risiko kehilangan data penting, serta memperlambat pengambilan keputusan strategis (Nasution & Siregar, 2021).

Manajemen kurikulum pun menjadi aspek yang belum optimal. Sebagian lembaga pendidikan Islam masih berfokus pada pengajaran kitab kuning atau ilmu-ilmu keislaman klasik tanpa adanya integrasi dengan kurikulum umum atau sains modern. Ketidakeimbangan ini membuat lulusan lembaga tersebut kesulitan bersaing di dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya inovasi dalam perancangan kurikulum juga menunjukkan lemahnya visi strategis dalam menghadirkan pendidikan Islam yang adaptif dan kontekstual (Zamroni, 2020).

Persoalan manajemen juga berkaitan erat dengan akreditasi dan standarisasi lembaga pendidikan Islam. Banyak madrasah dan pesantren yang belum terakreditasi atau memiliki akreditasi rendah karena tidak memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen mutu pendidikan yang menyangkut input, proses, dan output pendidikan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi lemahnya aspek manajerial ini, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dan lembaga terkait. Pelatihan manajemen pendidikan bagi kepala sekolah, pimpinan yayasan, atau pengasuh pesantren harus menjadi program prioritas. Selain itu, penguatan sistem informasi manajemen pendidikan Islam (EMIS) perlu terus dikembangkan agar lembaga-lembaga pendidikan Islam memiliki data yang akurat untuk pengambilan kebijakan (Kementerian Agama RI, 2023).

Lembaga pendidikan Islam juga perlu membangun budaya organisasi yang profesional, berbasis meritokrasi, dan berorientasi pada mutu. Manajemen yang baik tidak hanya soal administrasi dan keuangan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun iklim akademik yang sehat, budaya kerja kolaboratif, serta keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka lembaga pendidikan Islam akan mampu menjadi institusi yang kredibel, kompetitif, dan berdaya saing global.

Akhirnya, pembenahan manajemen dalam pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Tanpa reformasi manajemen, maka upaya perbaikan mutu pendidikan, peningkatan akses, dan penguatan SDM akan berjalan di tempat. Oleh karena itu, manajemen modern dan profesional harus menjadi pilar utama dalam reformasi pendidikan Islam di Indonesia.

RENDAHNYA DAYA SAING PENDIDIKAN ISLAM

Rendahnya daya saing lembaga pendidikan Islam merupakan problematika yang semakin kompleks dalam menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri 5.0. Daya

saing di sini tidak hanya mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, tetapi juga melibatkan kualitas kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, teknologi informasi, serta hubungan kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan zaman (Azyumardi Azra, 2019). Sayangnya, banyak lembaga pendidikan Islam masih tertinggal dalam berbagai aspek tersebut.

Kurikulum yang kaku dan belum terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab utama rendahnya daya saing lulusan pendidikan Islam. Kurikulum yang terlalu normatif dan minim muatan keterampilan praktis membuat lulusan pendidikan Islam sulit bersaing di dunia kerja, terutama dalam sektor-sektor ekonomi kreatif, teknologi, dan industri digital. Kurangnya pelatihan kewirausahaan, kemampuan literasi digital, serta kecakapan komunikasi global menjadi tantangan tersendiri (Zamroni, 2020).

Sarana dan prasarana yang belum memadai juga menjadi kendala. Banyak madrasah dan pesantren yang masih kekurangan fasilitas laboratorium, perpustakaan, ruang belajar interaktif, hingga jaringan internet yang stabil. Hal ini tentu menghambat proses belajar-mengajar yang efektif dan inovatif. Di tengah tuntutan digitalisasi pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi akan semakin tertinggal dalam kompetisi global (Kurniasih & Suryana, 2022).

Tenaga pendidik yang belum sepenuhnya profesional dan terlatih juga menjadi faktor rendahnya daya saing. Beberapa guru dan ustadz belum memiliki kualifikasi akademik yang memadai atau keterampilan pedagogik modern. Padahal guru merupakan agen utama transformasi kualitas pendidikan. Tanpa guru yang kompeten, inovatif, dan terus belajar, maka transformasi pendidikan Islam hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.

Lembaga pendidikan Islam juga masih minim dalam membangun jejaring dengan institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan komunitas global. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan keterasingan lembaga pendidikan Islam dari dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Padahal jaringan (networking) yang kuat merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan pertukaran sumber daya antar lembaga (Suyanto, 2017).

Untuk meningkatkan daya saing, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam pendekatan pendidikan Islam. Kurikulum harus dikembangkan secara kontekstual dan berbasis kompetensi. Pelatihan guru harus difokuskan pada penguasaan teknologi pendidikan, literasi global, dan metode pengajaran partisipatif. Sarana dan prasarana harus ditingkatkan melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Lembaga pendidikan Islam juga perlu aktif membangun kerja sama internasional dan menghadirkan program unggulan yang relevan dengan tantangan global masa kini.

Tanpa peningkatan daya saing, pendidikan Islam akan sulit menjadi pilar utama pembangunan umat dan bangsa. Oleh karena itu, modernisasi dan transformasi kelembagaan harus menjadi prioritas strategis agar pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peradaban global.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam saat ini berada dalam fase kritis yang menuntut transformasi menyeluruh agar mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa problem utama terletak pada lima aspek pokok.

Pertama, kurikulum pendidikan Islam masih diliputi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum serta tidak cukup adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21. Kedua, kualitas SDM pendidikan Islam masih rendah, terutama dari aspek kualifikasi akademik, pelatihan profesional, serta distribusi yang tidak merata. Ketiga, keterbatasan akses terhadap pendidikan Islam berkualitas masih menjadi persoalan struktural, geografis, dan ekonomi, khususnya di wilayah 3T. Keempat, manajemen lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya berbasis prinsip good governance, partisipatif, dan berbasis data. Dan kelima, lembaga pendidikan Islam masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing baik secara nasional maupun global.

Seluruh persoalan tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, reformasi pendidikan Islam tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat holistik dan terintegrasi, mencakup desain kurikulum, penguatan SDM, pengembangan infrastruktur, transformasi manajerial, serta peningkatan jejaring dan inovasi kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Amin Abdullah. (2013). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Azyumardi Azra. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2022). *Laporan Indeks Akses Pendidikan Islam di Daerah 3T*. Jakarta: Kemenag.
- Hasbullah. (2019). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Buku Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Evaluasi Sistem Manajemen Pendidikan Islam Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Statistik Pendidikan Islam Tahun 2022/2023*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam.
- Kurniasih, D., & Suryana, A. (2022). Digitalisasi Pendidikan Islam dalam Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 88–102.
- Mastuhu. (1994). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Jakarta: INIS.
- Mujamil Qomar. (2017). *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mukhibat, M. (2019). Manajemen Strategik Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 203-218.
- Nasution, S., & Siregar, D. (2021). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 22–35.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2021). *Kerangka Kurikulum dalam Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Sahin, A. (2018). *New Directions in Islamic Education: Pedagogy and Identity Formation*. Markfield: Kube Publishing.
- Sari, E. Y., & Supriyadi, T. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Digital*, 3(2), 120–135.
- Sulaiman, M., & Noor, S. (2021). The Challenges of Teacher Professionalism in Islamic Schools. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(1), 15–32.
- Suyanto. (2017). *Menata Ulang Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report: The Role of Teachers*. Paris: UNESCO.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Mapping Disparities in Access to Education in Remote Areas of Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Zamroni. (2020). Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis dan Praktis. *Jurnal Kurikulum Pendidikan Islam*, 5(2), 101–115.
- Zuhdi, M. (2005). Pendidikan Islam dalam Wacana Integrasi Ilmu. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 1–15.